

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Inflasi

Inflasi (*inflation*) adalah gejala yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung terus menerus. Dari pengertian tersebut maka apabila terjadi kenaikan harga hanya bersifat sementara, maka kenaikan harga yang sementara sifatnya tersebut tidak dapat dikatakan inflasi (Amir, 2008).

Inflasi secara umum didefinisikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat (*demand agregat*) relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespon kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan yang bersifat sementara (*temporer*) yang akan hilang dengan sendirinya seiring dengan berjalannya waktu.

Kenaikan harga dari satu atau dua jenis barang saja yang tidak berdampak bagi kenaikan harga barang lain tidak bisa disebut dengan inflasi. Kenaikan musimanpun, seperti kenaikan harga pada saat menjelang hari Raya Idul Fitri, Natal atau tahun baru tidak bisa disebut dengan inflasi, karena kenaikan tersebut bersifat sementara dan tidak memiliki pengaruh lanjutan. Kenaikan harga semacam ini tidak dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya. Karena kenaikan ini berlangsung secara terus menerus maka perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk dapat mengendalikannya, yaitu dengan kebijakan moneter untuk kembali menstabilkan perekonomian. Sesuai dengan pernyataan dari Julius R.

Latumaerissa (2011:22) definisi singkat dari inflasi ialah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus. Selain terjadi secara terus menerus, kenaikan harga bisa disebut dengan inflasi apabila kenaikan harga tersebut mencakup keseluruhan jenis barang. Sesuai dengan pernyataan dari Mankiw N. Gregory, Euston Quah dan Peter Wilson (2012:155) inflasi ialah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan. Inflasi tidak terjadi begitu saja, terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan terjadinya inflasi di suatu negara.

Beberapa sebab yang dapat menimbulkan inflasi antara lain pemerintah terlalu berambisi untuk menyerap sumber-sumber ekonomi lebih besar daripada sumber-sumber ekonomi yang dapat dilepaskan oleh pihak bukan pemerintah pada tingkat harga yang berlaku berbagai golongan dalam masyarakat berusaha memperoleh tambahan pendapatan relatif lebih besar daripada kenaikan produktifitas mereka, adanya harapan yang berlebihan dari masyarakat sehingga permintaan barang-barang dan jasa naik lebih cepat daripada tambahan keluarnya yang mungkin dicapai oleh perekonomian yang bersangkutan, adanya kebijakan pemerintah baik yang bersifat ekonomi atau non ekonomi yang mendorong kenaikan harga, pengaruh alam yang dapat mempengaruhi produksi dan kenaikan harga, pengaruh inflasi luar negeri, khususnya bila negara yang bersangkutan mempunyai sistem perekonomian terbuka. Pengaruh inflasi luar negeri ini akan terlihat melalui pengaruh terhadap harga-harga barang impor (Dwi Eko Waluyo, 2009).

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi untuk menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi (Siregar, 2010).

1. Kenaikan Harga

Harga suatu komoditas dikatakan naik apabila menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya. Perbandingan tingkat harga bisa dilakukan dengan jarak waktu; satu bulan, triwulan, atau satu tahun. Perbandingan harga juga bisa dilakukan berdasarkan patokan musim. Misalnya di musim panceklik pada umumnya harga beras akan mengalami kenaikan dan akan lebih mahal bila dibandingkan dengan harga beras pada musim panen.

2. Bersifat Umum

Kenaikan harga suatu komoditi belum dapat menggambarkan bahwa telah terjadi inflasi apabila kenaikan harga tersebut tidak mengakibatkan harga-harga secara umum naik. Misalnya, apabila pemerintah menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), pada umumnya harga-harga komoditas lain akan ikut naik karena BBM merupakan komoditi strategis, dimana sebagian besar kegiatan ekonomi memerlukan BBM, sehingga kenaikan harga BBM akan merambat pada kenaikan komoditas lainnya. Naiknya harga BBM ini dapat menimbulkan terjadinya inflasi.

3. Berlangsung Terus Menerus

Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan mengakibatkan inflasi apabila kenaikan harga tersebut terjadi hanya sesaat. Karena perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. Sebab dalam jangka waktu satu bulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus. Ukuran inflasi yang paling banyak digunakan ialah indek harga konsumen (IHK) yang juga dikenal dengan *consumer price index* (CPI). CPI mengukur pembelian standar untuk barang pada waktu yang beralainan, meliputi harga makanan, pakaian, perumahan, bahan

bakar, transportasi, perawatan medis, biaya perkuliahan, dan barang juga jasa lain yang dibeli untuk kehidupan sehari-hari.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Inflasi

Adapun jenis-jenis inflasi digolongkan menjadi 3 bagian (Siregar, 2010).

1. Berdasarkan derajatnya

Berdasarkan derajatnya inflasi diklasifikasikan menjadi empat golongan, yaitu :

a. Inflasi ringan (inflasi merayap)

Disebut juga *Creeping Inflation*. Inflasi ringan adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau dibawah 10% pertahun. Kenaikan harga berjalan secara lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

b. Inflasi sedang (inflasi menengah)

Inflasi sedang atau menengah ini merupakan inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantara 10-30% per tahun dan diwaspadai dampaknya terhadap perekonomian.

c. Inflasi berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun. Pada kondisi demikian, sektor-sektor produksi hampir lumpuh total, kecuali yang dikuasai negara. Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi yang artinya hargaharga minggu atau bulan ini lebih tinggi dari minggu atau bulan lalu dan seterusnya.

d. Inflasi sangat berat

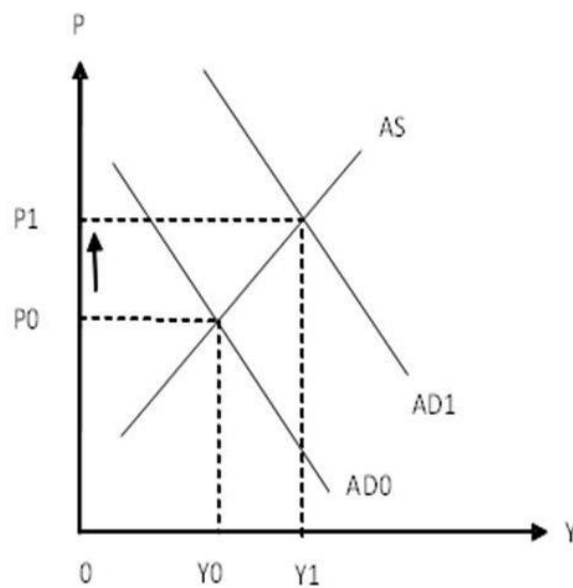
Disebut juga *Hyper Inflation*, adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melampaui 100% pertahun. Dalam kondisi ini, harga-harga barang naik menjadi lima atau enam kali lipat. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara pesat. Biasanya kondisi ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja yang dibiayai/ditutupi dengan mencetak uang.

2. Berdasarkan penyebabnya

Apabila ditinjau berdasarkan faktor penyebabnya, inflasi diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu:

a. *Demand Pull Inflation*

Disebut juga inflasi karena tarikan permintaan atau inflasi permintaan, inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian sedang berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya daya beli sangat tinggi. Daya beli yang tinggi akan mendorong permintaan melebihi total produk yang tersedia. *Permintaan aggregate* meningkat lebih cepat (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang, atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit yang murah) dibandingkan dengan potensi produktif perekonomian, akibatnya terjadi inflasi.



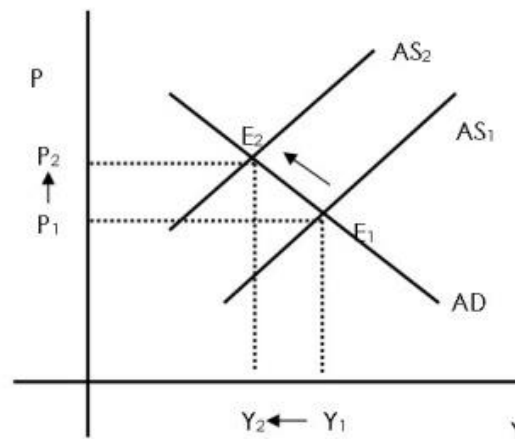
Gambar 2.1 Demand Pull Inflation (Inflasi Tekanan Permintaan)

Sumber: Siregar, 2010

Gambar 2.1 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat kenaikan permintaan. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva permintaan agregat dari AD_0 menjadi AD_1 yang mendorong harga naik dari P_0 menjadi P_1 . Kenaikan harga ini menimbulkan terjadinya inflasi. Akibat kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional bertambah dari Y_0 menjadi Y_1 .

b. Cost Push Inflation

Inflasi ini terjadi bila ada biaya produksi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan biaya produksi dapat berawal dari kenaikan harga input seperti kenaikan upah minimum, kenaikan bahan baku, kenaikan tarif listrik, kenaikan BBM, dan kenaikan-kenaikan input lainnya yang mungkin semakin langka dan harus diimpor dari luar negeri.



Gambar 2.2 Cost Push Inflation (Inflasi Dorongan Biaya)

Sumber, Siregar, 2010

Gambar 2.2 menjelaskan terjadinya inflasi sebagai akibat dari kenaikan biaya produksi. Hal ini terlihat dari adanya pergeseran kurva penawaran agregat dari AS_1 menjadi AS_2 yang mendorong harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Kenaikan harga ini menyebabkan produk nasional berkurang dari Y_1 menjadi Y_2 .

3. Berdasarkan asalnya

Apabila ditinjau berdasarkan asal inflasi, maka inflasi digolongkan menjadi dua golongan, yaitu :

a. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*)

Dimana inflasi ini timbul bisa saja karena defisit anggaran belanja negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru dan lain sebagainya sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang-barang dalam negeri secara umum dan berkesinambungan.

b. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*imported inflation*)

yaitu inflasi yang bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor, terutama barang yang diimpor tersebut mempunyai peranan penting dalam setiap kegiatan produksi.

2.1.1.2 Tinjauan Teoritis Tentang Inflasi

Terdapat beerbagai macam teori yang menjelaskan inflasi dari sudut pandang yang berbeda, Teori-teori tersebut yaitu, Teori Kuantitas Uang, Keynesian Model, Mark-up Model dan Teori Struktural (Atmadja, 1999).

1. Keynesian Model

Dasar pemikiran model inflasi dari Keynes ini, bahwa inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas kemampuan ekonomisnya, sehingga menyebabkan permintaan efektif masyarakat terhadap barang-barang (permintaan agregat) melebihi jumlah barang-barang yang tersedia (penawaran agregat), akibatnya akan terjadi *inflationary gap*. Keterbatasan jumlah persediaan barang (penawaran agregat) ini terjadi karena dalam jangka pendek kapasitas produksi tidak dapat dikembangkan untuk mengimbangi kenaikan permintaan agregat. Oleh karenanya sama seperti pandangan kaum *monetarist*, *Keynesian models* ini lebih banyak dipakai untuk menerangkan fenomena inflasi dalam jangka pendek. Dengan keadaan daya beli antara golongan yang ada di masyarakat tidak sama (heretogen), maka selanjutnya akan terjadi realokasi barang-barang yang tersedia dari golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang relatif rendah kepada golongan masyarakat yang memiliki daya beli yang lebih besar. Kejadian ini akan terus terjadi di masyarakat. Sehingga, laju inflasi akan berhenti hanya apabila salah satu golongan masyarakat tidak bisa lagi memperoleh dana (tidak lagi memiliki daya beli) untuk membiayai pembelian barang pada tingkat harga yang berlaku, sehingga permintaan efektif masyarakat secara keseluruhan tidak lagi melebihi *supply* barang (*inflationary gap* menghilang).

2. Mark-up Model

Mark-up Model, teori ini mendasarkan pemikiran bahwa inflasi ditentukan oleh dua komponen, yaitu *cost of production* dan *profit margin*. Dengan demikian, ketika terjadi kenaikan biaya produksi akan menyebabkan turunnya keuntungan yang didapat oleh perusahaan, yang berdampak kepada kenaikan harga jual komoditi di pasar.

3. Teori Struktural

Banyak studi mengenai inflasi di negara-negara berkembang, menunjukkan bahwa inflasi bukan semata-mata merupakan fenomena moneter, tetapi juga merupakan fenomena struktural atau *cost push inflation*. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi negara-negara berkembang pada umumnya yang masih bercorak agraris. Sehingga, guncangan ekonomi yang bersumber dari dalam negeri, misalnya gagal panen (akibat faktor eksternal pergantian musim yang terlalu cepat, bencana alam, dan sebagainya), atau hal-hal yang memiliki kaitan dengan hubungan luar negeri, misalnya memburuknya *term of trade*, utang luar negeri, dan kurs valuta asing, dapat menimbulkan fluktuasi harga di pasar domestik.

2.1.2 Pengangguran

Pengangguran merupakan hal yang akan selalu muncul didalam perekonomian, dimana saat pengeluaran agregatnya lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan faktor-faktor produksi yang telah tersedia didalam perekonomian untuk dapat menghasilkan barang-barang dan juga jasa (Prasaja, 2013). Salah satu alasan pengangguran selalu muncul didalam pengangguran adalah pencarian kerja. Pencarian kerja (*job search*) adalah suatu proses seseorang untuk mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan juga keterampilan sesuai yang dimiliki oleh

mereka. Namun, jika semua pekerja dan pekerjaan tidak ada bedanya, maka tidak menutup kemungkinan bagi para pekerja bahwa mereka cocok dengan pekerjaan apa saja, akan tetapi pada kenyataannya bakat dan juga kemampuan seseorang itu berbeda-beda (Mankiw dkk, 2012).

2.1.2.1 Jenis-Jenis Pengangguran

(Marius, 2004) menyatakan bahwa pengangguran sering diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau bekerja secara tidak optimal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*)

Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan.

2. Pengangguran Terselubung (*Disguessed Unemployment*)

Pengangguran terselubung yaitu pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan padahal dengan mengurangi tenaga kerja tersebut sampai jumlah tertentu tetap tidak mengurangi jumlah produksi. Pengangguran terselubung bias juga terjadi karena seseorang yang bekerja tidak sesuai dengan bakat dan kemampuannya, akhirnya bekerja tidak optimal.

3. Setengah Menganggur (*Under Unemployment*)

Setengah menganggur ialah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada pekerjaan untuk sementara waktu. Ada yang mengatakan bahwa tenaga kerja setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam

seminggu atau kurang dari 7 jam sehari. Misalnya seorang buruh bangunan yang telah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek, untuk sementara menganggur sambil menunggu proyek berikutnya.

(Marius, 2004) menyatakan bahwa bila ditinjau dari sebab-sebabnya, pengangguran dapat digolongkan menjadi 7, yaitu:

1. Pengangguran Friksional (Transisional).

Pengangguran ini timbul karena perpindahan orang-orang dari satu daerah ke daerah lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain dan karena tahapan siklus hidup yang berbeda.

2. Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Masyarakat yang ingin bekerja di sektor industri sulit bekerja karena mereka terbiasa bekerja di sektor perkebunan sehingga harus menyesuaikan diri bila ingin bekerja di sektor industri.

3. Pengangguran Siklikal atau Siklus atau Konjungtural

Pengangguran ini terjadi karena maju-mundurnya ekonomi suatu negara. Ketika perekonomian mengalami kemunduran daya beli masyarakat pun akan menurun. Akibatnya perusahaan akan mengurangi produksi dan perusahaan banyak memberhentikan karyawannya.

4. Pengangguran Musiman (Seasonal)

Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim, misalnya orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah mereka

akan bekerja selama musim panen setelah itu mereka menganggur menunggu musim berikutnya.

5. Pengangguran Teknologi

Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Perusahaan biasanya lebih memilih menggunakan tenaga mesin dibandingkan tenaga manusia karena lebih cepat, mudah dan hemat biaya.

6. Pengangguran Politis

Pengangguran ini terjadi karena adanya peraturan pemerintah yang secara langsung atau tidak, mengakibatkan pengangguran. Misalnya penutupan Bank-bank bermasalah sehingga menimbulkan PHK.

7. Pengangguran Deflatoir

Pengangguran deflatoir ini disebabkan tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan dalam perekonomian secara keseluruhan, atau karena jumlah tenaga kerja melebihi kesempatan kerja, maka timbullah pengangguran.

2.1.3 Teori Pengangguran

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang Teori-Teori Pengangguran yaitu:

1. Teori Klasik

Teori Klasik menjelaskan pandangan bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Menurut pandangan klasik, pengangguran terjadi karena mis-alokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga.

Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi. Peningkatan tenaga kerja selanjutnya mampu menyerap kelebihan tenaga kerja yang ada di pasar, apabila harga realatif stabil (Tobar, 2000).

2. Teori Keynes

Dalam menanggapi masalah pengangguran Teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik, menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah. Sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat agar sektor pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan (Soesastro, dkk, 2005). Perlu dicermati bahwa pemerintah hanya bertugas untuk menjaga tingkat permintaan agregat, sementara penyedia lapangan kerja adalah sektor wisata. Hal ini memiliki tujuan mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat terjaga. Sehingga tidak memperparah resesi serta diharapkan mampu mengatasi pengangguran akibat resesi.

2.1.4 Kebijakan Pemerintah Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran

Indonesia sebagai negara berkembang sampai saat ini masih belum bisa dipisahkan dari masalah-masalah sosial yang mencengkeram masyarakatnya, terutama masalah sosial ekonomi serta masalah lapangan pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah daerah perlu membuat kebijakan demi terciptanya kesempatan kerja yang tinggi untuk mengurangi tingkat pengangguran. Adapun beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi masalah pengangguran (Lelau, 2013).

1. Kebijakan Subsidi

Subsidi tidak berupa aktivitas pemerintah secara langsung tetapi lebih kepada dorongan lingkungan secara lokal maupun nasional sedemikian rupa sehingga aktivitas perekonomian berjalan secara optimum. Kebijakan subsidi tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen yang memuat bermacam-macam insentif, daya tarik, kemudahan-kemudahan untuk merangsang investasi baru dan perluasan proyek.

2. Bantuan Infrastruktur

Pemberian bantuan infratraktur oleh pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi pengangguran yang ingin memiliki tempat usaha.

3. Program Pelatihan dan Kemitraan.

Program ini adalah program umum diterapkan untuk mendorong pertumbuhan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Adapun beberapa contoh programnya antara lain, meningkatkan ketrampilan masyarakat, memberikan ketrampilan spesifik kepada masyarakat yang akan dimanfaatkan oleh perusahaan, memberikan ketrampilan dasar umum untuk menanamkan strategi memperoleh lowongan kerja atau berwirausaha.

4. Kebijakan Upah

Kebijakan untuk menerapkan formula pada penghitungan Upah Minimum juga disambut baik karena memberikan kepastian, baik kepada pengusaha maupun buruh, tentang kenaikan upah yang bakal diterima buruh setiap tahun dengan besaran yang terukur.

5. Bantuan Pinjaman

Bantuan pinjaman sering diberikan atas keputusan pemerintah karena akses terhadap pasar modal rendah dan guna membantu pengangguran yang memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja sendiri.

2.1.5 Kebijakan Pememrintah dalam Pengendalian Inflasi

Dalam mengatasi Inflasi terdapat beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyangkut bidang moneter, fiskal dan non moneter, antara lain:

1. Kebijakan Moneter

Kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar. Penyebab inflasi di antaranya jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Kebijakan dalam bidang moneter, yaitu meliputi:

- a. Politik diskonto yang bertujuan untuk menaikkan tingkat bunga karena dengan bunga kredit tinggi maka aktivitas ekonomi yang menggunakan dana pinjaman akan tertahan karena modal pinjaman menjadi mahal.
- b. Politik pasar terbuka dilakukan dengan cara menawarkan surat berharga ke pasar modal.

- c. *Cash ratio* yaitu cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada bank-bank umum yang besarnya tergantung pada keputusan dari bank sentral/pemerintah.

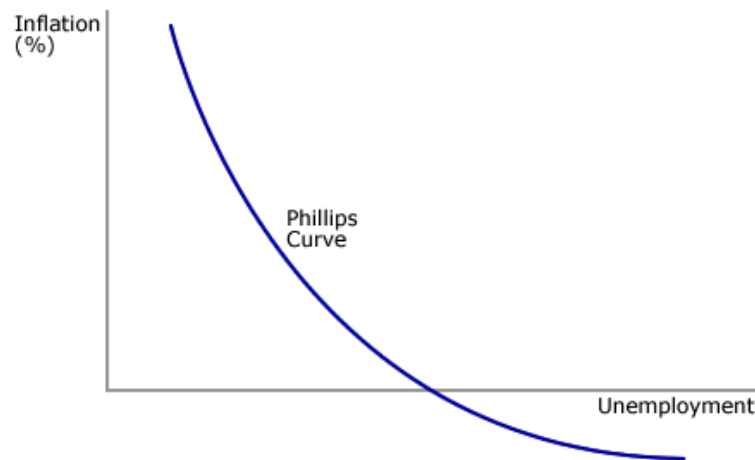
2. Kebijakan fiskal

kebijakan fiskal adalah salah satu faktor yang membentuk arah ekonomi negara. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mempengaruhi ekonomi dengan menyesuaikan tingkat pendapatan dan pengeluaran. Salah satu bentuk kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal kontraksional. Kebijakan fiskal kontraksional digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi, seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, upaya dalam kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan Pengurangan pengeluaran pemerintah, berurusan dengan pendapatan dan belanja modal. Pengeluaran ini dilakukan paa bidang-bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, membayar utang negara, bunga internal dan eksternal atas utang-utang. Pengeluaran tersebut harus di kendalikan untuk menciptakan kestabilan ekonomi.
- b. Menaikkan pajak, akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat akan berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif akan berkurang.

3. Kebijakan output/sektor riil dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, kebijakan upah, pengawasan harga, dan distribusi barang.

2.1.6 Teori A.W.Phillips



Gambar 2.3 Kurva Phillips

Sumber: Amri Amir, 2008

A.W. Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) tingkat pengangguran akan berkurang.

Bentuk kurva Phillips memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan hubungan negatif antara perubahan tingkat upah dan tingkat pengangguran, yaitu saat tingkat upah naik, pengangguran rendah, ataupun sebaliknya. Kurva Phillips membuktikan bahwa antara stabilitas harga dan kesempatan kerja yang tinggi tidak mungkin terjadi secara bersamaan, yang berarti bahwa jika ingin mencapai kesempatan

kerja yang tinggi/tingkat pengangguran rendah, sebagai konsekuensinya harus bersedia menanggung beban inflasi yang tinggi.

Dengan kata lain, kurva ini menunjukkan adanya *trade-off* (hubungan negatif) antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran, yaitu tingkat pengangguran akan selalu dapat diturunkan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran (Rizki, 2012). Inflasi dapat dikaitkan secara langsung dengan besarnya pengangguran yang terjadi. Hal ini dapat diketahui pada kaitan antara tingkat inflasi (upah) dengan tingkat pengangguran yang ditunjukkan dengan kurva Phillips. Pada awalnya, kurva Phillips memberikan gambaran kasar mengenai kausalitas proses inflasi. Rendahnya tingkat pengangguran dianggap memiliki keterkaitan dengan ketatnya pasar tenaga kerja dan tingginya tingkat pendapatan dan permintaan dari konsumen. Kurva Phillips juga memberikan gagasan mengenai pilihan (*trade off*) antara pengangguran dan inflasi. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika tingkat inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah (Dernburg, 1994).

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap peneliti yang dilakukan oleh penulis. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Fakhry Hadiyan /2018/Analisis Hubungan Inflasi dan Pengangguran di Indonesia periode 1980-2016 dengan Pendekatan Kurva Phillips	Inflasi, Pengangguran		Dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif. Dalam jangka panjang hubungan positif.
2	Yosephine Dwi Indah Murtisari, Nurcahyaningtyas, S.E.,M.Si./2018/Keterkaitan Tingkat Inflasi Dan Tingkat Pengangguran di Indonesia Tahun 1991 – 2014	Inflasi, Pengangguran		Variabel tingkat inflasi memiliki hubungan satu arah terhadap pengangguran.
3	Lilis Nurul Qotimah/2014/ Analisis Kausalitas Granger Antara Inflasi Dengan Pengangguran di Indonesia Periode Tahun 1987-2013	Inflasi, Pengangguran		Terdapat kausalitas searah antara Inflasi dengan Pengangguran.
4	Suci Basuki Rahmat /2018/ Analisis Kausalitas Antara Inflasi Dan Pengangguran Di Indonesia Tahun 1987 – 2015	Inflasi, Pengangguran		Terdapat kausalitas satu arah.
5	Niki Ermija Oktavia, Amri/2017/Analisis Kausalitas Antara Inflasi Dan Konsumsi di Indonesia	Inflasi	Konsumsi	terdapat hubungan kausalitas satu arah antara variabel inflasi terhadap

				variabel konsumsi.
6	Aris Budi Setyawan/2005/Kausalitas Jumlah Uang Beredar Dan Infasi (Sebuah Kajian Ulang)	Inflasi	Jumlah Uang Beredar	Kausalitas satu arah dimana perubahan JUB akan mempengaruhi tingkat inflasi di Indonesia. dan bukan sebaliknya.
7	Taufiq C. Dawood, Emi Anjalia/2017/Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Harga Minyak Dunia Dan Inflasi Di Indonesia	Inflasi	Pertumbuhan Ekonomi, Suku Bunga, Jumlah Uang Beredar, Harga Minyak Dunia	Adanya Hubungan 1 arah dari PDB ke Inflasi dimana pada saat PDB meningkat mendorong terjadinya Inflasi.
8	Khairil Anwar, Ansari/2018/ Analisis Hubungan Kausalitas Antara Jumlah Uang Beredar, Bi Rate Dan Inflasi Di Indonesia Tahun 2010-2016	Inflasi	Jumlah Uang Beredar, BI Rate	Tidak ada hubungan kausalitas antara JUB dengan inflasi dan Terdapat hubungan satu arah antara BI Rate dengan inflasi
9	Ach Zuhri/2018/Analisis Kausalitas Antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Jumlah Uang Beredar Dan Sukuk Di Indonesia : Menggunakan Pendekatan Kointegrasi Dan Kausalitas Granger	Inflasi	Jumlah Uang Beredar, Pertumbuhan Ekonomi, Suku k	Menunjuka n dalam jangka panjang tidak ditemukan hubungan antara pertumbuha

				n ekonomi, jumlah uang beredar, inflasi dan suku periode 2009-2017
10	Afrizal/2014/ Analisis Kausalitas Inflasi dan Jumlah Uang Beredar di Indonesia Periode Tahun 2000.1–2014.4	Inflasi	Jumlah Uang Beredar	Hasil estimasi uji <i>Granger Causality</i> menunjukkan bahwa jumlah uang beredar di Indonesia tidak berpengaruh terhadap tingkat inflasi, namun tingkat inflasi di Indonesia berpengaruh terhadap jumlah uang beredar
11	Indah Susilowati/2016/Analisis Hubungan Kausalitas Antara Jumlah Uang Beredar Dengan Inflasi Di Indonesia (1981-2015)	Inflasi	Jumlah Uang Beredar	Variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif stasioner terhadap inflasi sedangkan variabel inflasi berpengaruh positif stasioner terhadap jumlah uang beredar di

				Indonesia.
12	Ike Nofiatin/2013/Hubungan Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2005–2011	Inflasi	Suku Bunga, PDB, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, Dan IHSG	hubungan kausalitas dua arah antara variabel makroekonomi dan IHSG.
13	Dumairy/1987/Kausalitas Antara Uang Beredar Dan Inflasi Di Indonesia (1968-1985)	Inflasi	Jumlah uang Beredar	Adanya mekanisme umpan-balik antara uang dan harga di Indonesia.
14	Hari Sugiyanto/2017/ <i>The Causality Between Energy Consumption And Gross Domestic Product (GDP) In Indonesia, Malaysia, Thailand And Singapore</i>		Konsumsi Energi, PDB	Menunjukkan bahwa tidak terdapat kausalitas satu arah dari konsumsi energi ke PDB, tetapi terdapat kausalitas searah dari PDB ke konsumsi energi di Indonesia, Thailand dan Singapura. Di Malaysia tidak terdapat hubungan kausalitas antara konsumsi energi dan PDB.

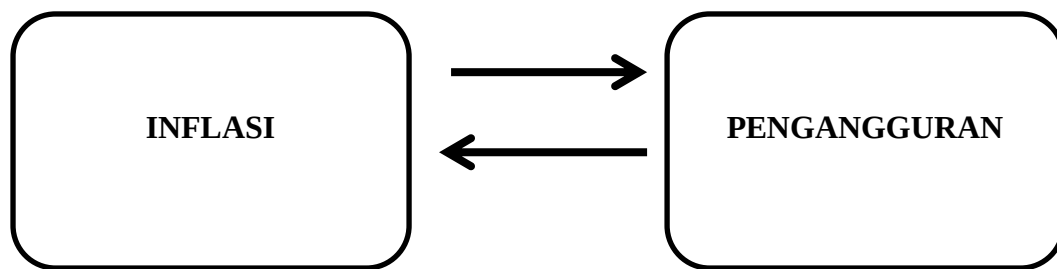
15	Peggy Riyani Laping, Tri Oldy Rotinsulu, Mauna Th.B.Maramis/2016/Analisis Kausalitas Jumlah Uang Beredar Dan Suku Bunga Acuan Bank Indonesia (BI Rate) Di Indonesia Periode 2009.1–2015.4		Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga	Terdapat kausalitas hubungan dua arah antara kedua variabel tersebut.
----	---	--	---------------------------------	---

2.3 Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu inflasi dan pengangguran. Pengangguran dan inflasi adalah dua masalah ekonomi utama yang dihadapi setiap masyarakat. Inflasi memiliki hubungan dengan banyak masalah ekonomi yang lain. Inflasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh masalah-masalah ekonomi lain tersebut. Salah satu masalah ekonomi yang berhubungan dengan inflasi adalah pengangguran. Tingkat pengangguran hingga kini dipercaya saling berkorelasi dengan kenaikan harga secara umum (inflasi).

2.4 Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Kurva philips merupakan suatu teori yang mengemukakan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Kurva Phillips pertama kali dikemukakan oleh A.W. Phillips, pada tahun 1958. Phillips menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara pengangguran dan perubahan tingkat upah. Phillips menggunakan perubahan tingkat upah karena upah akan mempengaruhi harga barang dan jasa dan pada akhirnya juga mempengaruhi inflasi. Ada 2 faktor yang mempengaruhi laju perubahan tingkat upah yaitu laju perubahan permintaan tenaga kerja, dan pengangguran.



Gambar 2.4 Model Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran diatas maka hipotesis atau dugaan sementara dalam penelitian ini, penulis merumuskan hipotesa sebagai berikut:

1. Diduga terjadi hubungan kausalitas antara tingkat inflasi dengan pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018
2. Diduga kurva Phillips tidak berlaku di Provinsi Jawa Barat tahun 2006-2018